

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>The European Council, the Council, and the European Green Deal (Politics and Governance)</i>	Jeffrey Rosamond, Claire Dupont	Penelitian ini sama-sama memahami perkembangan European Green Deal.	Penelitian ini berfokus pada respons Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa (selanjutnya disebut Dewan) terhadap kemunculan dan pengembangan European Green
2.	<i>Energy transition scenarios: What policies, societal attitudes, and technology developments will realize the EU Green Deal? (Energy)</i>	Karlo Hainsch, Konstantin Löffler, Thorsten Burandt, Hans Auer, Pedro Crespo del Granado, Paolo Pisciella, Sebastian Zwickl-Bernhard	penelitian sama-sama melihat EU Green Deal sebagai langkah Uni Eropa menuju <i>net zero emission</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan openENTRANCE yang mengembangkan skenario transisi energi dengan kerangka kerja tiga dimensi. Kerangka ini mencakup ketidakpastian dalam kebijakan, teknologi, dan sikap masyarakat untuk membentuk berbagai alur cerita masa depan
3.	<i>The European (Green?) Deal: a systematic analysis of environmental sustainability (Sustainable Development)</i>	Joan Hereu-Morales, Alba Segarra, César Valderrama	Penelitian ini sama-sama melihat <i>European Green Deal</i> sebagai alat menyusun rencana transisi Uni Eropa yang berkelanjutan.	Penelitian ini menilai potensi sebenarnya dari <i>European Green Deal</i> sebagai alat menyusun rencana transisi Uni Eropa yang berkelanjutan.
4.	<i>The European Green Deal Agenda After the Attack on Ukraine: Exogenous Shock Meets Policy-Making Stability (Politics and Governance)</i>	Frank Wendler	Melihat dan menggali hambatan dalam implementasi <i>European Green Deal</i>	Penelitian menggali <i>European Green Deal</i> untuk mengatasi ketergantungan energi Uni Eropa pada Rusia.

5.	<i>State, Society and Environmental Security in International Relations Theory (Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences)</i>	Justin Joseph	Penelitian ini sama-sama membahas keamanan lingkungan dan bagaimana aktor-aktor yang terlibat dapat memengaruhi kebijakan terkait keberlanjutan.	Penelitian ini berfokus pada negara, dan menganjurkan perspektif post-positivis dengan menyoroti peran masyarakat, LSM, dan aktor non-negara, terutama di konteks non-Barat seperti China.
6.	<i>Global democratization and international regime complexity (European Journal of International Relations)</i>	Jonathan W. Kuyper	Penelitian ini sama-sama mengenai rezim internasional.	Penelitian ini mengonseptualisasikan demokrasi global sebagai proses demokratisasi yang sedang berlangsung
7.	<i>Renewable Energy Share in European Industry: Analysis and Extrapolation of Trends in EU Countries (Energies)</i>	Bożena Gajdzik ,Rafał Nagaj, Radosław Wolniak, Dominik Bałaga, Brigita Źuromskaitė and Wiesław Wes Grebski	Penelitian ini sama-sama melihat tujuan Uni Eropa untuk mencapai emisi "nol bersih" pada tahun 2050,	Penelitian ini menyelidiki proses dekarbonisasi industri dengan menganalisis tren dalam adopsi RES di negara-negara Uni Eropa.
8.	<i>Policy learning from evidence during polycrises: a case of EU environmental policy (Policy Design and Practice)</i>	Bishoy Zaki, Valérie Pattyn & Ellen Wayenberg	Penelitian ini sama-sama melihat bagaimana tekanan krisis, seperti invasi Rusia ke Ukraina, memengaruhi proses pengambilan kebijakan Uni Eropa.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana <i>polycrisis</i> memengaruhi praktik pembelajaran kebijakan berbasis bukti, termasuk interaksi antara politik dan bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan.
9.	<i>Assessing the sustainability of the</i>	Phoebe Koundouri,	Penelitian ini sama sama	Penelitian ini difokuskan pencapaian

	<i>European Green Deal and its interlinkages with the SDGs (npj Climate Action)</i>	Angelos Alamanos, Angelos Plataniotis, Charis Stavridis, Konstantinos Perifanos, & Stathis Devves	melihat European Green Deal sebagai langkah Uni Eropa menuju keberlanjutan.	Eu Green Deal dan SDG's.
10.	<i>A globally just and inclusive transition? Questioning policy representations of the European Green Deal (Global Environmental Change)</i>	Håkon da Silva Hyldmo, Ståle Angen Rye, Diana Vela-Almeida	Penelitian ini sama-sama menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan European Green Deal, terutama pada komunitas rentan di Global South, dengan menekankan pada representasi wacana transisi yang adil dan inklusif.	Penelitian ini berfokus pada dampak sosial dan ekologis dari European Green Deal, terutama pada komunitas rentan di Global South, dengan menekankan pada representasi wacana transisi yang adil dan inklusif.

Literatur pertama berjudul *The European Council, the Council, and the European Green Deal* (Rosamond & Dupont, 2021). Penelitian ini bertujuan menilai respons Dewan Uni Eropa dan Dewan Eropa terhadap kemunculan pengembangan European Green Deal, dengan melakukan tinjauan pustaka tentang peran historis kedua lembaga antarpemerintah dalam pengembangan kebijakan iklim Uni Eropa.

Menurut Rossamond *European Green Deal* dapat menjadi terobosan dari langkah-langkah bertahap sebelumnya dalam tata kelola iklim Uni Eropa. *European Green Deal* menyiapkan kerangka kerja transformasional yang baru bagi Uni Eropa, Rossamond memberikan tiga elemen inti dari *European Green Deal* yaitu, Ambisi untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050, sifatnya sistemik dan integratif, dan pendekatan transisi yang adil.

Rossamond, menemukan bahwa Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa telah menyatakan dukungan untuk *European Green Deal* dan prinsip-prinsip dasarnya. Dewan Eropa terlibat dengan ketiga elemen tersebut tetapi menyebutkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 paling sering dan dengan intensitas yang meningkat selama bertahun-tahun yang dipelajari. Dewan juga membahas tiga elemen *European Green Deal* dan memberikan fokus yang lebih besar pada transisi terpadu/sistematik selama tahun 2018-2020.

Literature ini digunakan untuk memahami perkembangan European Green Deal serta hubungannya dengan pemangku kepentinganya seperti Dewan Eropa dan Uni Eropa namun pada penelitian ini respons Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa terhadap kemunculan dan pengembangan European Green dan.

Literatur kedua berjudul **Energy transition scenarios: What policies, societal attitudes, and technology developments will realize the EU Green Deal?** (Hainsch et al., 2022). Menekankan pentingnya kemajuan teknologi, penegakan kebijakan, dan komitmen masyarakat dalam mencapai tujuan EU Green Deal. Penelitian ini juga mengulas berbagai skenario masa depan untuk transisi energi, menyoroti perlunya tingkat elektrifikasi yang tinggi dan langkah-langkah kebijakan yang kuat untuk memfasilitasi dekarbonisasi yang cepat.

Selain itu, penelitian ini membahas strategi dekarbonisasi untuk sektor-sektor kunci seperti listrik, industri, bangunan, dan transportasi, serta pentingnya insentif keuangan dan perubahan perilaku masyarakat. Jurnal ini juga membahas proyek open ENTRANCE dan skenario-skenario yang dikembangkan untuk menilai jalur energi dan transportasi, serta pentingnya analisis skenario dalam mendukung pengambilan kebijakan untuk masa depan energi yang berkelanjutan di Eropa.

Penelitian ini menghasilkan pentingnya transisi energi di Eropa untuk mencapai dekarbonisasi pada 2050. Fokus utama adalah elektrifikasi, penggunaan energi bebas karbon, dan efisiensi energi melalui mobilitas listrik dan pompa panas. Berbagai skenario menunjukkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 80%-100%, bergantung pada teknologi dan kebijakan yang efektif. Penelitian juga menekankan interaksi antara kebijakan, teknologi, dan sikap masyarakat dalam menentukan jalur transisi energi. Proyek openENTRANCE menunjukkan bahwa

kebijakan yang kuat dapat mempercepat proses ini. Rekomendasi kebijakan mencakup percepatan energi terbarukan, pengelolaan infrastruktur gas alam, serta pengembangan teknologi hidrogen dan penangkapan karbon.

Literatur ketiga berjudul *The European (Green?) Deal: a systematic analysis of environmental sustainability* (Hereu-Morales et al., 2024). Penilitian tersebut tantangan dalam *European Green Deal*. Terdapat delapan tantangan dan sektor transformatif yang dibedakan dalam *European Green Deal*: iklim, energi, industri, bangunan, mobilitas, pangan, keanekaragaman hayati, dan polusi.

Pada penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi sebenarnya dari *European Green Deal* sebagai alat menyusun rencana transisi Uni Eropa yang berkelanjutan melalui analisis wacana kritis terhadap asumsi yang diambil dalam rencananya dalam hal keberlanjutan. *European Green Deal* disajikan dalam wacana sebagai rencana induk transformatif dalam hal perencanaan publik untuk keberlanjutan, dan jelas berorientasi pada pencapaian tujuan Paris Agreement dan menuju penaanaman visi keberlanjutan Agenda 2030.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana *European Green Deal* tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasanya karena mereka menyajikan hal-hal yang fundamental keleahan pada keberlanjutan lingkungan. Meskipun *European Green Deal* merupakan sebuah produk evolusi dalam perencanaan publik untuk keberlanjutan di Uni Eropa, namun evolusi ini masih kurang karena mengulang kesalahan-kesalahan serius dari perencanaan sebelumnya. Secara keseluruhan, *European Green Deal* cacat karena fokusnya pada pertumbuhan ekonomi apa pun yang terjadi, yang membahayakan upaya pada isu-isu pembangunan keberlanjutan yang tidak menyiratkan hubungan langsung dengan ekonomi, terutama yang menyangkut konservasi modal alam.

Penelitian tersebut memberikan penjelasan *European Green Deal* sebagai alat menyusun rencana transisi Uni Eropa yang berkelanjutan.

Literatur keempat berjudul *The European Green Deal Agenda After the Attack on Ukraine: Exogenous Shock Meets Policy-Making Stability* (Wendler, 2023). Dalam penelitian tersebut menggunakan teori *Punctuated Equilibrium Theory* (PET) untuk mengeksplorasi dampak konflik Ukraina terhadap agenda

European Green Deal dan bagaimana kebijakan ini dipertahankan atau berubah dalam konteks krisis eksternal.

Wendler Menerapkan PET pada tata kelola iklim dan energi UE saat ini merupakan ujian penting untuk memahami perubahan kebijakan dalam bidang pembuatan kebijakan ini dan untuk mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh teori ini untuk menjelaskan tingkat ketahanan dan kontinuitas yang tinggi yang diamati dalam analisis empiris.

Wendler menunjukkan baik signifikansi perang sebagai guncangan eksogen maupun relevansi faktor intra-sistemik dalam sistem tata kelola UE yang memitigasi potensi pergeseran kebijakan. Seperti yang ditunjukkan oleh survei dokumen kebijakan, dampak perang terhadap perhatian dan agenda politik lembagalembaga UE teratas diungkapkan dengan jelas tetapi sebagian besar diserap dalam subsistem kebijakan yang lebih terspesialisasi dari kebijakan iklim UE.

hal tersebut menunjukkan meskipun ada guncangan eksternal akibat perang, kebijakan energi dan iklim Uni Eropa tetap mempertahankan stabilitas yang relatif kuat. Perang menggeser fokus Uni Eropa ke arah keamanan energi dan pengurangan impor energi dari Rusia, namun agenda utama European Green Deal tetap dipertahankan dan diperluas melalui program REPowerEU. Program ini meningkatkan target energi terbarukan dan efisiensi energi, mengakomodasi kebutuhan geopolitik tanpa menggantikan kebijakan yang ada. Struktur kebijakan UE menunjukkan ketahanan dengan mengandalkan subsistem terpisah, perlindungan kelembagaan, dan kontrol Komisi Eropa atas revisi kebijakan.

Literatur kelima berjudul *State, Society and Environmental Security in International Relations Theory* (Joseph, 2023). Dalam konteks teori hubungan internasional (IRT), Justin Joseph mengkaji hubungan antara negara, masyarakat, dan keamanan lingkungan. Penelitian ini mengkritik pendekatan IRT tradisional yang berfokus pada negara dan menekankan bahwa pemahaman post-positivis diperlukan, yang menggabungkan dinamika masyarakat dan aktor non-negara dalam menangani krisis lingkungan.

Menurut *Justin Joseph*, peran aktor masyarakat dalam proses sekuritisasi sangat penting karena keterlibatan mereka dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas tindakan keamanan lingkungan. Selain itu, untuk lebih baik menangani

masalah keamanan non-tradisional yang muncul, penelitian ini meminta IRT yang ada dilengkapi dengan pandangan dari tatanan politik non-Barat.

Secara keseluruhan, *Justin Joseph* menyoroti pentingnya mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam tindakan negara dan masyarakat, serta memperluas komunitas politik dan konstituensi moral untuk mempromosikan tatanan politik demokratis yang hijau. Penelitian ini juga menekankan peran aktor non-negara dalam tata kelola lingkungan, terutama dalam konteks non-Barat seperti China, di mana LSM lingkungan semakin terlibat dalam menangani tantangan ekologi.

Dengan demikian, meskipun fokus Joseph lebih luas, pemahaman tentang peran masyarakat dan aktor non-negara dalam keamanan lingkungan memberikan wawasan yang dapat melengkapi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Literatur keenam berjudul *Global democratization and international regime complexity* (*Kuyper, 2013*). Menjelaskan demokratisasi tata kelola transnasional harus mengadopsi 'pendekatan yang berupaya', yang bekerja berdasarkan premis bahwa 'meskipun model-model demokrasi yang dominan tidak dapat begitu saja dipindahkan dari ranah nasional, kita dapat dan harus mencoba menerjemahkan nilai-nilai inti demokrasi ke dalam bentuk kelembagaan yang dapat diwujudkan ketika merancang atau mereformasi praktik tata kelola transnasional.

Penelitian ini berpendapat bahwa demokratisasi kompleks rezim harus terjadi di dua bidang yang berbeda: ranah negosiasi multilateral, dan bentuk-bentuk kelembagaan eksperimentalisme demokrasi antara pembuat aturan dan pengambil aturan.

Penelitian ini mengonseptualisasikan demokrasi global sebagai proses demokratisasi yang sedang berlangsung di mana serangkaian nilai normatif inti kurang lebih terpenuhi dan menjelaskan partisipasi yang setara, akuntabilitas, dan revisibilitas kelembagaan sebagai standar-standar utama tersebut.

Lini penelitian ini demokratisasi kompleks rezim yang berbeda akan menunjukkan kemungkinan untuk memikirkan demokratisasi global yang sesungguhnya melalui penerapan tiga nilai tersebut sebagaimana diterapkan pada perdagangan, HAKI, hak asasi manusia, rantai pasokan, politik pengungsi, dan bidang-bidang isu lainnya. Namun, pada akhirnya, fokus pada kompleksitas rezim

menawarkan potensi baru dan inovatif untuk perubahan kelembagaan yang demokratis dalam politik dunia.

Keterkaitan isu dan pergeseran rezim dapat digunakan untuk memajukan nilai-nilai normatif dan praktik-praktik demokrasi yang berhasil dapat disebarluaskan di dalam dan di antara kompleks-kompleks. Hal ini memberikan strategi jangka panjang yang membutuhkan minat, analisis, dan penerapan yang berkelanjutan untuk mengejar standar-standar demokrasi global.

Literatur ketujuh berjudul *Renewable Energy Share in European Industry: Analysis and Extrapolation of Trends in EU Countries* (Gajdzik et al., 2024). Tujuan dari penelitian adalah untuk memperkirakan lintasan integrasi dalam industri dan menilai kelayakan untuk memenuhi target yang diuraikan dalam Kesepakatan Hijau Eropa.

Penelitian ini menyelidiki proses dekarbonisasi industri dengan menganalisis tren dalam adopsi pemanfaatan sumber energi terbarukan di negara-negara Uni Eropa dan mengevaluasi kemajuan mereka terhadap target iklim. Dengan memanfaatkan analisis deret waktu produksi, total penggunaan energi, dan proporsi energi terbarukan dalam konsumsi energi industri, studi ini membandingkan dua kelompok negara: anggota Uni Eropa yang sudah lama dan anggota baru.

Penelitian ini mengungkapkan kesenjangan yang cukup besar antara target yang ditetapkan dan hasil yang diproyeksikan, dengan hanya beberapa negara yang diharapkan untuk memenuhi tujuan Uni Eropa tahun 2030. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan dalam porsi energi terbarukan di seluruh negara anggota, yang berkisar antara 0,0% hingga 53,8% pada tahun 2022.

Literatur kedelapan berjudul *Policy learning from evidence during polycrises: a case of EU environmental policy* (Zaki et al., 2024). Untuk waktu yang lama, perubahan iklim telah dianggap sebagai krisis, terutama di Uni Eropa. Kerangka European Green Deal menggunakan bukti dalam dua cara. Secara terprogram, sebagai bagian dari agenda Regulasi Lebih Baik, untuk meningkatkan pengambilan keputusan di masa mendatang. Kedua, untuk menetapkan dan melacak target kinerja di area-area utama. Indikator termasuk, tetapi tidak terbatas

pada, kondisi ekologis perairan Uni Eropa, pembangkitan dan pengolahan limbah polusi udara, dan populasi burung.

Uni Eropa mengambil langkah menuju pemulihan "hijau" dari krisis COVID-19 dan mengalami guncangan geopolitik saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Invasi Ukraina dianggap sebagai ujian sulit lainnya bagi tekad Uni Eropa mengenai kebijakan iklim dan lingkungan dengan risiko nyata untuk kembali ke pola konsumsi energi pra-European Green Deal.

Zaki et al menunjukkan bahwa selama polycrisis, struktur dan praktik pembelajaran kebijakan berbasis bukti tidak mengalami perubahan substantif atau kualitatif yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat perubahan dalam cara penggunaan bukti, dengan penekanan lebih besar pada indikator ekonomi, terutama dari operator dan kelompok ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa dalam beberapa fase, politik dan bukti ilmiah saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan, dengan peran bukti dan politik yang berfluktuasi di berbagai fase.

Penelitian *Zaki et al.* menyoroti pentingnya pembelajaran kebijakan berbasis bukti dalam konteks krisis kompleks, seperti perubahan iklim, pandemi, dan geopolitik energi, yang juga menjadi fokus proposal ini. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam pendekatan dan fokus kedua penelitian. *Zaki et al.* berfokus pada bagaimana polycrisis memengaruhi praktik pembelajaran kebijakan berbasis bukti, termasuk interaksi antara politik dan bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan.

Literatur kesembilan berjudul *Assessing the sustainability of the European Green Deal and its interactions with the SDGs* (*Koundouri et al., 2024b*). mengungkapkan keselarasan substansial kebijakan EGD dengan SDGs terkait energi bersih (SDG7), aksi iklim (SDG13), dan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG12). Sebaliknya, terdapat kekurangan representasi yang signifikan di area-area yang terkait dengan isu-isu sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan perdamaian, sebagaimana ditunjukkan oleh keselarasan yang lebih rendah dengan SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, dan 16.

Pada Penelitian ini menggambarkan keselarasan kebijakan EGD dengan enam transformasi keberlanjutan penting yang diusulkan oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN) pada tahun 2019 untuk operasionalisasi SDG.

Hasilnya menunjukkan bahwa selain prevalensi “Dekarbonisasi Energi dan Industri Berkelanjutan”, semua bidang telah mendapat perhatian, kecuali “Kesehatan, Kesejahteraan, dan Demografi”. Temuan tersebut menyerukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menangani spektrum keberlanjutan secara seimbang.

Literatur kesepuluh berjudul *A globally just and inclusive transition? Questioning policy representations of the European Green Deal* (*da Silva Hyldmo et al., 2024*). mengkaji bagaimana aktivitas ekstraktif dan dampak negatifnya direpresentasikan dalam wacana European Green Deal (EGD). Studi ini menyoroti adanya ketegangan antara tujuan EGD untuk menciptakan transisi hijau yang adil dan inklusif dengan ketergantungannya pada ekstraksi bahan mentah dalam jumlah besar yang diperlukan untuk dekarbonisasi. Dari 195 dokumen kebijakan Uni Eropa yang dianalisis, ditemukan bahwa meskipun dampak lingkungan dan sosial dari ekstraksi diakui secara eksplisit maupun implisit, isu ini sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kebutuhan *European Green Deal* untuk mengamankan akses ke bahan mentah. Wacana *European Green Deal* cenderung membingkai transisi ini sebagai sesuatu yang global dan adil, meskipun dampak negatif dari ekstraksi, terutama di wilayah Global South, sering diabaikan atau kurang ditonjolkan. Hal ini diperkuat oleh penggunaan retorika seperti "transisi yang adil" yang justru mengaburkan kontradiksi antara ambisi kebijakan dan dampak aktual di lapangan.

da Silva Hyldmo et al menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam narasi kebijakan *European Green Deal*. Dampak negatif dari ekstraksi bahan mentah hanya disebutkan secara terbatas, dengan sebagian besar perhatian tertuju pada tantangan internal Uni Eropa, seperti restrukturisasi ekonomi dan pengurangan lapangan kerja.

da Silva Hyldmo et al mengkritik *European Green Deal* karena belum sepenuhnya menangani dampak sosial dan ekologis dari kebijakan transisi hijau, terutama di luar Uni Eropa. Meskipun narasi yang digunakan menekankan keadilan

dan inklusivitas, ketergantungan pada bahan mentah justru menciptakan kontradiksi yang bertentangan dengan tujuan tersebut. *da Silva Hyldmo et al* menekankan perlunya pengakuan yang lebih jujur terhadap ketegangan ini dan mendesak pembuatan kebijakan yang lebih holistik untuk memastikan transisi hijau yang benar-benar adil, baik bagi negara-negara maju maupun berkembang.